

TAJUK RENCANA

Waspada, Kelonjakan (Lagi) Harga Migor

MINYAK goreng (migor) produksi pemerintah 'MinyaKita' mulai langka. Minyak goreng kemasan yang memang untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng beberapa saat lalu, terlihat mulai berkurang di pasaran akhir-akhir ini. Dan ini diakui oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (KR 31/1). Padahal Mi-nyaKita adalah merek minyak goreng yang diluncurkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Juli 2022, sebagai produk untuk menekan harga minyak goreng yang tinggi saat itu. Produk itu sekarang bukan hanya bisa dida-pat di pasar tradisional saja, namun merambah masuk di pasar modern.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, MinyaKita saat ini populer di ka-langan masyarakat, karena di-anggap sebagai produk kualitas premium dengan harga rendah. Mengapa mulai langka? Alasan pertama sudah menjadi minyak goreng populer sehingga banyak penggemarnya, yang kedua, ma-salah suplai minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) Indonesia juga digunakan untuk biode-sel B35. Padahal pemerintah menambah B20 menjadi B35. B20 menyedot 2 juta CPO, untuk mengubah dari menjadi B20 itu perlu 9 juta, diubah untuk B35 menjadi 3 juta, sehingga diper-lukan 12 juta. Ini yang telah menyedot materi kebutuhan pro-duksi MinyaKita.

Untuk mengatasi, Kemendag sudah memanggil produsen mi-nyak untuk menaikkan suplai. Hampir 30 pengusaha sepakat untuk menaikkan supplinya. Se-mula produksi suplai MinyaKita tiap bulan 300.000 ton, digen-jot menjadi 450.000 toh, atau naik 50%. Para pengua tersebut su-dah tanda tangan sepakat. Dan juga belum tercium adanya ok-num nakal dalam peredaran Mi-nyaKita, kata Zulhas. Benarkah?

Seperti kita ketahui harga minyak goreng Senin (30/1) ke-marin bergerak naik. Panel harga bahan pangan menunjukkan ke-naikan pada minyak goreng curah atau kemasan melampaui Harga

Eceran Tertinggi (HET). Harga minyak goreng curah naik, dari semula Rp10.000 perliter menjadi Rp 14.940. Sedangkan harga minyak goreng kemasan menjadi Rp 17.910.

Apapun penyebabnya, namun jika harga minyak goreng tersebut tidak ditangani secara serius, bukan tidak mungkin akan menja-di 'horor' tak terkendali seperti be-berapa waktu lalu. Apalagi saat ini menghadapi bulan puasa, disusul hari raya Idul Fitri sudah bisa dibayangkan bakal ada angka ke-naikan penggunaan minyak go-reng sebagai pelengkap tradisi.

Pengendalian produksi Mi-nyakKita ternyata di tangan peda-gang. Meski sudah berjanji, tetapi tetap saja pengusaha yang tidak mau dirugikan. Karena itu sudah saatnya dijadikan pertimbangan agar stok CPO dipegang atau di-kendalikan pemerintah. Sehingga emerintah perlu memiliki cadang-an minyak goreng nasional.

Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk memi-liki *Dynamic Stock* Komoditas Mi-nyak Goreng atau Cadangan Mi-nyak Goreng Nasional. Sehingga cadangan minyak goreng nasio-nal dapat dilakukan dengan pe-nyediaan tangki-tangki besar pa-da setiap wilayah. Hal tersebut berkaca seperti halnya komoditas pangan lainnya yang dikelola BUMN Pangan. Jika sudah di-siapkan cadangan, ketika terjadi kenaikan harga terhadap komodi-tas minyak goreng, maka peme-rintah dapat menggelontorkan stok, sebaliknya ketika harga tu-run dapat menyimpan stok kem-bali.

Adanya pemanggilan pengusa-ha tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah ingin melakukan sta-bilisasi namun tidak memiliki stok. Belum lagi ketika kebutuhan ba-nyak sementara barang tidak ada. Terbukti pernah terjadi Om-budsman menemukan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng tidak berjalan di beberapa wilayah di Indonesia. Mengapa? dikarenakan distribusi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. (***)

'Kere Hore' Yogya, Fakta atau Mitos?

JANUARI 2023, BPS mengeluarkan data Persentase Penduduk Miskin. Dari data tersebut tergambar, DIY merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa, 11,49%. Persentase tersebut lebih tinggi dibanding-kan dengan persentase nasional 9,57% (BPS, 2023). Data ini kemudian berkem-bang menjadi perdebatan di masyarakat. Data kemiskinan dianggap anomali ka-re-na dilihat dari angka statistik, apalagi DIY mempunyai tingkat harapan hidup tertinggi dan tingkat kebaha-giaan yang tinggi. Dengan kata lain, DIY merupakan provinsi paling miskin, tetapi warganya bahagia. Situasi ini sebenarnya sudah disadari sejak lama sehingga muncul istilah 'kere hore'.

'Kere hore' merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang kekurangan (*kere*), tetapi tetap bahagia (*hore*). Namun, benarkah saat ini masyarakat Yogyakarta masih ba-hagia? BPS mengeluarkan indeks ke-bahagiaan. Indeks kebahagiaan meru-pakan ukuran pembangunan yang bersifat subjektif karena terkait persepsi masyarakat dalam melihat kehidupan sehari-hari daerahnya.

Mengalami Penurunan

Berdasarkan indeks kebahagiaan yang dikeluarkan BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta mempunyai indeks kebahagiaan 71,70. Angka ini kalah dengan Provinsi Maluku Utara yang angkanya 76,34. Angka ini juga kalah de-ngan Provinsi Jawa Timur (72,08) dan Jawa Tengah (71,73), meskipun lebih tinggi dari indeks kebahagiaan Jawa Barat (70,23) dan DKI Jakarta (70,68) (BPS, 2021). Ber-dasarkan perbandingan tersebut menun-jukkan bahwa warga Yogyakarta bukan warga paling bahagia di Indonesia.

BPS mengeluarkan indeks kebahagiaan setiap tiga tahun sekali. Jika dibanding-kan dengan angka survei sebelumnya, yaitu 2017 dan 2014 peringkat indeks ke-bahagiaan DIY mengalami penurunan. Tahun 2014 DIY di peringkat 5 terbaik, tahun 2017 turun menjadi peringkat 8,

Pajar Hatma IJ

dan tahun 2021 turun ke peringkat 21 (BPS, 2021). Penurunan ini seharusnya bisa menjadi perhatian karena secara na-sional indeks kebahagiaan rata-rata ma-syarakat Indonesia mengalami kenaikan.

Turunnya indeks kebahagiaan perlu di-waspadaai agar tidak terus mengalami



penurunan. Indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, serta makna hidup (*eudaimonia*). Tiga dimensi tersebut diturunkan dalam 19 indikator. Mulai dari kepuasan terhadap pendidikan, pendapa-tan, kesehatan, rumah dan fasilitas rumah, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, perasaan gembira, perasaan tidak khawatir, kemandirian, lingkungan, hu-bungan positif dengan orang lain, sampai tujuan hidup (BPS, 2021).

Ada beberapa pertanyaan dalam indeks kebahagiaan yang perlu diperhatikan pe-merintah DIY tidak mengalami penu-runan kembali. Pertanyaan tersebut me-nyangkut keamanan berkendara di malam hari, kondisi air bawah tanah, kepemilikan rumah, serta solidaritas sosial. Hal ini perlu diperhatikan meng-

ingat fenomena klithih, bakteri e-coli, in-flasi harga tanah, serta kesenjangan si kaya dan si miskin.

Mempengaruhi Kebahagiaan

Munculnya fenomena klithih sejak 2016 membuat masyarakat khawatir berken-daraan di malam hari. Kerusakan ling-kungan juga mulai dirasakan di Yogya-karta yang ditandai dengan tingginya bak-teri e-coli di semua sungai. Bakteri e-coli ini juga sudah masuk ke sumur-sumur masyarakat. Jika tidak diatasi ke de-pannya untuk minum, masyarakat harus membeli air kemasan. Ketika hal itu terjadi tentu akan mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat. Kesenjangan kekayaan masyarakat (gini ratio) Yogyakarta juga tertinggi di Indonesia, yaitu 0,459 (BPS, 2023). Kesenjangan ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat kebaha-giaan masyarakat dan sulitnya kelom-pok miskin untuk membeli tanah aki-bat inflasi.

Berdasarkan data statistik dan kon-disi sehari-hari masyarakat, Pemerin-tah DIY harus segera berbenah untuk merespons kemiskinan dan penurunan indeks kebahagiaan. Diharapkan pe-merintah membuat kebijakan yang di-arahkan untuk memperbaiki lingkung-an yang menyangkut kepentingan dasar, seperti perlindungan air minum dan kea-manan. □ - d

**)Dr Pajar Hatma Indra Jaya, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan meng-irimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redak-si hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang di-tulis serta jangan lupa menampilkan fo-tocopy identitas. Terimakasih.

(Dana) Keistimewaan yang Menyejahterakan

PENULIS mengikuti rapat kerja veri-fikasi hasil pengendalian dana keistimewa-an DIY tahun anggaran 2022, Rabu (25/1). Dana Keistimewaan DIY tahun 2022 sebe-sar Rp 1,32 triliun, besaran alokasi yang sama dari APBN sejak tahun 2020. Serapan anggaran dana keistimewaan DIY tahun 2022 senilai Rp1,27T atau sebesar 96,42%, termasuk kategori tinggi (Paniradya Kais-timewan, 2023).

Di samping prestasi capaian serapan anggaran dana keistimewaan yang selalu tinggi, terdapat pertanyaan reflektif yang patut kita ungkapkan. Sejauhmana atribut keistimewaan dengan dana keistimewaa-nya menjadi akselerator bagi penyelesaian sejumlah isu strategis di DIY seperti kemis-kinan, ketimpangan kesejahteraan, dan ketimpangan wilayah?

BPS merilis data kemiskinan DIY, terjadi peningkatan angka kemiskinan kondisi Maret 2022 ke September 2022 dari 11,34% (454,76 ribu) menjadi 11,49% (463,63 ribu). Secara persentase ini merupakan angka ke-miskinan tertinggi di Pulau Jawa (KR, 25/1). Ketimpangan kesejahteraan yang di-ukur dengan Rasio Gini juga menunjukkan kondisi yang tak cukup menggembirakan. Angka Rasio Gini DIY periode September 2022 sebesar 0,459, meningkat dari periode sebelumnya (Maret 2022) sebesar 0,439 (BPS, 2023).

Langkah Strategis

Ada beberapa langkah yang dapat di-lakukan Pemda DIY dalam mengelola dana keistimewaan agar dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Per-tama, menyusun rencana pengelolaan dana keistimewaan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Saat ini adalah momentum yang tepat, Pemda DIY sedang menyusun Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) periode 2022-2027.

Kedua, mengalokasikan dana keistime-waan ke program-program yang terkait de-ngan penanggulangan kemiskinan, seperti

M Taufiq AR

program pemberdayaan ekonomi masyara-kat, program pemberian bantuan sosial, dan program pemberdayaan kelompok ma-syarakat. Perlu fokus pada program dan kegiatan yang benar-benar strategis dan berorientasi hasil jangka panjang, memiliki *leverage* luas menyelesaikan akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

Ketiga, membangun dan mendorong ke-terbukaan informasi, akses, dan pelibatan inklusif atas tafsir keistimewaan serta pe-manfaatan dana keistimewaan. Perlunya media yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses program-pro-gram yang didesain pemerintah daerah, memberikan masukan dan kritikan, serta mendapatkan umpan balik atas aspirasi tersebut.

Keempat, melakukan kerja sama dan ko-laborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah lainnya, un-tuk memperkuat perencanaan dan pelak-sanaan program-program yang telah diru-muskan.

Langkah Kolaborasi

Dalam mengelola dana keisti-mewaan DIY, Pemda juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Perlu identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan di ma-sing-masing wilayah. Hal ini dap-at dilakukan dengan melibatkan masyarakat, baik melalui musya-warah atau survei kebutuhan.

Selanjutnya dapat dilakukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan mempertim-bangkan sumber daya yang terse-dia. Komitmen UGM sebagai per-guruan tinggi terbesar di DIY da-pat diimplementasikan dan disi-nergikan dalam hajat ini. Strategi

serupa yang dapat dilakukan untuk menge-lola dana keistimewaan secara kolaboratif adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, pemerin-tah kabupaten, dan Pemerintah DIY. Pem-berdayaan masyarakat melalui program-program kemitraan yang menjadi bagian dari pembangunan juga perlu ditingkatkan.

Program-program tersebut dapat berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, pem-berdayaan dalam pengelolaan sumber daya alam (misalnya pemanfaatan Tanah Desa dan Tanah Kasultanan untuk usaha pro-duktif komunal di desa). Atau program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola dana keisti-mewaan berkolaborasi 4K (Kampus, Kampung, Kraton, Kaprajan), akan tercipta sinergi yang efektif dalam pembangunan yang terintegrasi. Niscaya (dana) keistime-waan DIY dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan warga yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan. □ - d

**) M Taufiq AR, Perencana pada Bappeda DIY, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil DIY.*

Pojok KR

Sidang Sambo : Jika Putri jujur, mudah dapat simpati.
-- Mungkin Putri punya pendapat, 'jujur kui ajur'.

Kepala BPS : Perbaiki data kelola data kemis-kinan.
-- Sebaiknya yang perlu diperbaiki adalah kemiskinannya.

Polisi akan razia kendaraan knalpot blom-bongan.
+ Pak Polisi terima kasih, ikut menyela-matkan telinga!

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjianti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiati.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)